



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2020-2021
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN
28-30 JANUARI 2021**

*

**

**

*

JAKARTA 2021



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2020-2021
KE PROVINSI SUMTERA SELATAN
28-30 JANUARI 2021

I. PENDAHULUAN

1. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
 - b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 3 Desember 2020.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 12 Januari 2021.

2. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan dalam rangka melaksanakan salah satu dari tiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, terutama terkait:
 - a. Meninjau kondisi dan sistem pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan dan pengelolaan sampah Kota Palembang;
 - b. Tata kelola, Infrastruktur sarana prasarana, sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan strategi pemasaran hasil perikanan di Pasar Ikan Modern Kota Palembang;
2. Melihat langsung di lapangan program dan kegiatan dari mitra kerja Komisi IV DPR RI terkait dengan sejauhmana realisasi pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan; serta
3. Menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

4. SUSUNAN TIM

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI), dengan susunan anggota tim sebagaimana terlampir.

5. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 dilaksanakan pada tanggal 28-30 Januari 2021 di Provinsi Sumatera Selatan.

6. LOKASI KUNJUNGAN KERJA

Lokasi kunjungan kerja spesifik Tim Komisi IV DPR RI di Kota Palembang, adalah;

1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan, Kec. Sukarimi, Kota Palembang.

2. Pasar Ikan Modern (PIM) Desa 8 ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang.

II. GAMBARAN UMUM

1. Administrasi

Provinsi Sumatera Selatan sejak abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya, dimana termasuk kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Gaung dan pengaruhnya bahkan sampai ke Madagaskar di Benua Afrika. Namun sejak abad ke-13 sampai abad ke-14, Sriwijaya berada di bawah kekuasaan Majapahit. Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 12 Kabupaten dan 4 Kota, yang terdiri dari:

- Kab. Ogan Komering Ulu (Ibukota Baturaja).
- Kab. Ogan Komering Ulu Timur (Ibukota Martapura).
- Kab. Ogan Komering Ulu Selatan (Ibukota Muara Dua).
- Kab. Ogan Komering Ilir (Ibukota Kayu Agung).
- Kab. Muara Enim (Ibukota Muara Enim).
- Kab. Lahat (Ibukota Lahat).
- Kab. Musi Rawas (Ibukota Muara Beliti).
- Kab. Musi Banyuasin (Ibukota Sekayu).
- Kab. Banyuasin (Ibukota Pangkalan Balai).
- Kab. Empat Lawang (Ibukota Tebingtinggi).
- Kota Ogan Ilir (Ibukota Indralaya).
- Kota Palembang (Ibukota Palembang).
- Kota Pagar Alam (Ibukota Pagar Alam).
- Kota Lubuk Linggau (Ibukota Lubuk Linggau).
- Kota Prabumulih (Ibukota Prabumulih).
- Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (Ibukota Talang Ubi).
- Kabupaten Musi Rawas Utara (Ibukota Muara Rupit).

2. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Saat ini permasalahan sampah selalu menghantui kota-kota besar di Indonesia karena hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat memproduksi sampah setiap harinya, mulai dari sampah domestik rumah tangga, sampah dari pemukiman penduduk, sampah perkantoran, sampah pertokoan dan

pasar, serta sampah industri kecil dan menengah. Secara statistik produksi sampah selalu meningkat dari tahun ke tahun karena pertumbuhan kota yang pesat dari sisi jumlah penduduk hingga perkembangan aktivitas ekonominya. Selain itu, peningkatan sampah di suatu kota/kabupaten juga terjadi akibat adanya tambahan sampah dari kota/kabupaten lain.

Kota Palembang adalah ibukota Provinsi Sumatera Selatan dengan penduduk sebanyak 1.662.893 jiwa (BPS Kota Palembang) setiap hari menghasilkan timbunan sampah sebanyak 1.170 sd 1.200 ton perhari (DLHK Kota Palembang), dengan rincian sebagai berikut:

TIMBULAN SAMPAH KOTA PALEMBANG 2019

Sampah Pasar Tradisional & Modern	95 Ton/hari
Sampah Retail	18 Ton/hari
Sampah di TPS	695 Ton/hari
Sampah Sekolah	30 Ton/hari
Sampah Restoran & Hotel	18 Ton/hari
Sampah Fasilitas Umum	6 Ton/hari
Sampah Pelayanan Kesehatan	38 Ton/hari
Sampah Perkantoran	8 Ton/hari
Sampah Sumber Lainnya (Ruko/Kios/Industri)	194 Ton/hari
Dan lain-lain (Jalan, Sungai, Tempat Ibadah, TPS 3R)	79 Ton/hari
TOTAL	1.170 Ton/hari

Untuk melakukan pengelolaan sampah di Kota Palembang beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang, antara lain:

1. Penanganan Sampah, meliputi kegiatan;
 - a. Membersihkan dan menyapu jalan.
 - b. Mengangkut/membuang sampah dari TPS ke TPA.
 - c. Pengelolaan, pemanfaatan sampah di TPA.
 - d. Memelihara dan merawat, menyimpan dan menyiapkan kendaraan angkutan sampah serta sarana kebersihan lainnya.
2. Pengurangan Sampah

- a. Memberikan sosialisasi, bimbingan teknis pengelolaan sampah dari sumber dengan konsep 3R kepada masyarakat.
- b. Membina 29 Bank Sampah dan 21 TPS 3R dengan peran serta masyarakat.
- c. Menerbitkan himbauan, edaran, dan sosialisasi pengurangan sampah plastik pada pengusaha retail serta kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan sampah plastik (kantong plastik berbayar).
- d. Pembatasan kantong plastik (pembatasan saat Idul Adha).
- e. Pemakaian tumber.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan terletak di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang mempunyai luas kurang lebih 25 hektar. TPA mulai beroperasi mulai tahun 1994 hingga saat ini. Namun kondisi TPA saat ini sudah hampir terisi kapasitas maksimalnya, sehingga Pemerintah Kota Palembang beberapa kali menutup TPA dengan alasan penuh.



(Sumber : UPT. TPA Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang)

3. Bidang Kelautan dan Perikanan

Pasar Ikan Modern merupakan pelaksanaan kegiatan prioritas di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana amanat Instruksi Presiden No. 7 tahun 2016 tentang Percepatan Industri Perikanan Nasional, serta Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi

Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Komisi IV DPR RI melihat pasar ikan merupakan sentra bisnis kelautan dan perikanan yang perlu dibenahi di Indonesia karena selain menyediakan suplai produk perikanan bermutu, aman dikonsumsi dan terjangkau harganya, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pengolah, pemasar, serta dapat menjadi destinasi wisata kuliner dan sarana informasi/edukasi.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI berharap Ditjen Penguatan Daya Saing KKP untuk senantiasa berkomitmen menerapkan prinsip sanitasi, menjamin berjalannya Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan agar tidak mencemari daerah sekitarnya yang padat penduduk, mengingat permasalahan limbah merupakan hal yang sensitif dikeluhkan oleh warga. Walaupun Pasar Ikan Modern Palembang sudah dilengkapi UKL-UPL sebagai izin lingkungan, namun pelaksanaannya proses pembuangan limbah dari IPAL ke saluran drainase masih perlu dibenahi sehingga perlu evaluasi atas instalasi dan sistem IPAL di Pasar Ikan Modern Palembang.

Selain itu, KKP harus berkomitmen menjaga produk ikan yang higienis karena hal tersebut merupakan cerminan kebersihan dan kesehatan, serta keberlanjutan suatu sistem bisnis perikanan yang baik, mengingat kualitas ikan menjadi persyaratan utama untuk menghasilkan produk ikan yang aman konsumsi. Adapun terkait tata kelolanya juga menjadi perhatian khusus, dimana ke depan jangan sampai fungsi dan peruntukan yang seharusnya untuk ikan, diganti atau beralih fungsi untuk komoditas selain produk ikan. Hal ini perlu diantisipasi secara sistematis sistem logistiknya dengan mempertimbangkan aspek jarak ke Pelabuhan Perikanan Sungsang.

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. KUNJUNGAN KE TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SUKAWINATAN KEC. SUKARIMI, KOTA PALEMBANG

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ini dilakukan dalam rangka merespon keluhan terkait kondisi pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan yang sudah menumpuk dan rawan bencana, karena lokasi TPA Sukawinatan saat ini berada di pemukiman penduduk. Dari luas 25 hektar, tumpukan sampah

memenuhi luasan 20 hektar dan 5 hektar adalah fasilitas pendukung dan kolam-kolam pengolahan kompos.

TPA Sukawinatan dioperasikan dengan metode *controlled landfill*, yang mana sampah-sampah yang sudah ditumpuk dan dipadatkan akan ditutup dengan lapisan tanah setiap 7 hari sekali. Metode ini dilakukan sebagai antara untuk melakukan metode *sanitary landfill* yang mana penutupan tanah dilakukan setiap hari. Setiap hari sampah yang masuk ke TPA Sukawinatan sebesar 864,14 ton atau 73 % (persen) dari timbulan sampah yang dihasilkan Kota Palembang setiap harinya. Dari semua sampah yang masuk disortir untuk diubah menjadi kompos sebanyak 2 ton per hari dan untuk bahan baku daur ulang TPA sebesar 1 ton per hari, sisanya sebanyak 861,14 ton/hari masuk ke *landfill*. Pemerintah Kota Palembang dalam upaya untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA Sukawinatan mendirikan dan membina 29 Bank Sampah, 5 unit TPS 3R yang berada di beberapa kecamatan, 1 Unit Rumah Kompos, 2 unit *Biodigester*, 2 unit *workshop* daur ulang, dan 72 lapak pengepul sampah.

Pada pertemuan dengan Pengelola TPA Sukawinatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang dengan Komisi IV DPR RI disampaikan kendala yang dihadapi dalam mengelola sampah di Kota Palembang yaitu kekurangan alat angkut, kontainer, *armroll* dan alat berat di TPA Sukawinatan. Sampah sebelum masuk ke TPA akan di tampung di TPS-TPS permanen yang tersebar, namun karena perkembangan kota dan penduduk, banyak TPS permanen yang dibongkar dan diganti dengan kontainer. Sebagai pengganti TPS alat untuk mengumpulkan sampah diganti dengan kontainer yang mana menurut kajian kebutuhan kontainer sebanyak 122 unit namun hanya 60 kontainer yang dimiliki dan 25 unit dalam kondisi kurang layak.

Untuk mengangkut kontainer-kontainer sampah dari lokasi ke TPA di perlukan *armroll*. Sedangkan untuk proses pengangkutan diperlukan alat angkut berupa *dump truck*. Jumlah *dump truck* yang dimiliki 121 unit dengan 60% dalam kondisi yang kurang layak. Alat berat juga diperlukan untuk menunjang kegiatan pengolahan sampah di TPA, saat ini alat berat yang dimiliki 6 unit dari 8 unit yang di perlukan.

Pengelola TPA Sukawinata saat ini mendapatkan bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dari Kementrian ESDM yang menggunakan teknologi gas metan dengan kapasitas produksi listrik 500 KW. Gas metan yang

berasal dari proses bakteri anaerob sampah di salurkan ke turbin untuk memproduksi listrik. Namun pada praktiknya di TPA Sukawinatan, gas metan yang dihasilkan tidak cukup untuk menggerakkan turbin dan memproduksi listrik. Oleh karena itu, oleh Kementerian ESDM akan diganti dengan teknologi *seed gas*. Tapi mengalami kendala juga karena teknologi ini belum mendapatkan sertifikat kelaikan dari pihak yang berwenang.

Saat ini solusi dan potensi pengelolaan sampah di Kota Palembang, antara lain:

1. Melakukan pengurangan sampah dengan cara:
 - a. Melakukan sosialisasi dan pelatihan pemilahan sampah dari rumah tangga melalui Gerakan Pilah Sampah dari Rumah;
 - b. Pendampingan penyusunan regulasi dan ujicoba pembatasan/pelarangan 3 jenis plastik sekali pakai yaitu kantong plastik, sedotan plastik, dan wadah styrofoam pada minimarket, pertokoan, pasar, hotel, restoran, dan café;
 - c. Pendampingan penyusunan peraturan eco/green office di kantor pemerintah, kantor BUMN, pelabuhan, dll;
 - d. Pendampingan penyusunan regulasi dan uji coba pengurangan sampah berbasis di sumber (desa/ kelurahan, kampung, atau RT/RW) dengan pendekatan 3R;
 - e. Pendekatan partisipasi publik melalui pengurangan sampah.
2. Peningkatan kapasitas dan pendekatan teknologi (TPS 3R, Pusat Daur Ulang (PDU), Rumah Kompos, TPST, dan lain –lain.
3. Pengelolaan di TPA Sukawinatan sudah urug terkendali (*Controlled Landfill*), namun harus tetap dilakukan pengurangan sampah dari sumbernya agar umur TPA lebih Panjang dan sampah yang masuk ke TPA lebih sedikit.

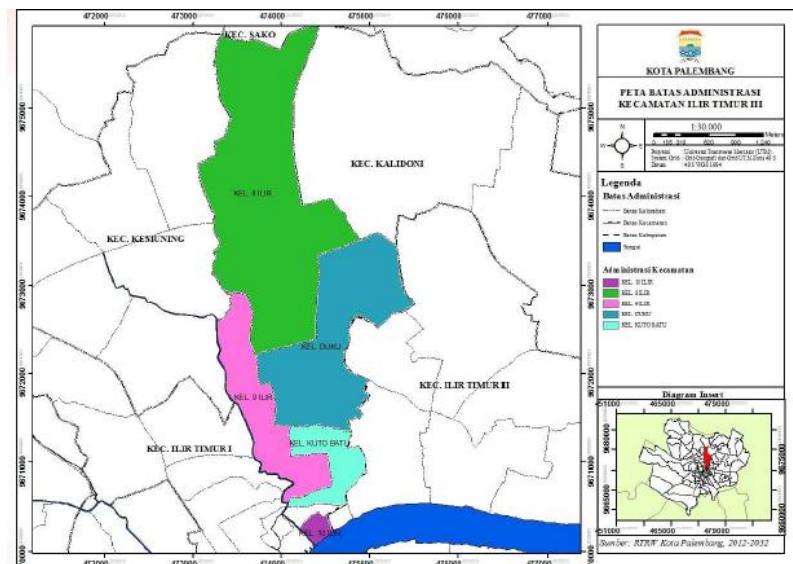
Pada kesempatan pertemuan kali ini Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun dan Berbahaya menyampaikan upaya untuk mengurangi timbunan sampah di TPA Sukawinatan adalah dengan teknologi *refuse-derived fuel* (RDF) yaitu teknologi pengolahan sampah melalui proses *homogenizers* menjadi ukuran yang lebih kecil. Hasilnya sebagai sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran, sebagai pengganti batu bara *low* kalori untuk pabrik semen.

Potensi sampah untuk bahan baku Pabrik Semen Baturaja sudah didiskusikan oleh Dirjen PSLB3 dengan Gubernur Sumatera Selatan, namun kendala pemanfaatan teknologi ini adalah biaya transportasi dari lokasi TPA ke pabrik semen yang jauh.

B. KUNJUNGAN KE PASAR IKAN MODERN

1. Profil Singkat:

- Penempatan Pasar Ikan Modern Kota Palembang yang berlokasi di jalan MP. Mangku Negara Perumnas, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III atas rekomendasi dari Pemerintah Kota Palembang yang menyediakan lahan.
- Pasar Ikan Modern berada di pusat Kota Palembang dimana di sekitarnya padat lalu lintas kendaraan. Adapun batas wilayah administrasi, sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni dan Kecamatan Sako.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Musi di Kecamatan Seberang Ulu II.
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni dan Kecamatan Ilir Timur II.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Ilir Timur I.



- Kota Palembang merupakan salah satu daerah yang konsumen ikannya cukup baik, karena makanan berbahan dasar ikan merupakan makanan utama masyarakat sejak dahulu, dimana berdasarkan data BPS konsumsi ikan di Kota Palembang mencapai 40 kg per kapita per tahun dengan ikan yang dihasilkan rata-rata 12-15 ton per hari dan kebutuhan konsumsi mencapai 18 ton per hari.

- Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Modern dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Pemerintah Kota Palembang tertuang dalam Perjanjian Hibah No.6729/DJPDSKP/HK.155/IX/2020 dan No 02/PH/BPKAD/2020.
- Ijin lingkungan atas kegiatan Pembangunan Pasar Ikan Modern oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang No. 15/KPTS-IL/DLHK/2019.
- Temuan BPK kepada Pihak Ketiga yang membangun Pasar Ikan Modern terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp177,9 juta dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp347,5 juta.

2. Temuan:

- Sepinya pengunjung dan pedagang ikan di Pasar Ikan Modern Kota Palembang, dimana terinformasi dari pihak pengelola awalnya jumlah pedagang ikan yang tercatat sekitar 154 orang, namun secara bertahap terus berkurang hingga menjadi sekitar 20-an pedagang ikan yang masih aktif.
- Belum optimalnya fungsi dan keberadaan Pasar Ikan Modern sebagai sentra bisnis perikanan, seperti komoditas ikan segar, ikan hidup ataupun olahan, serta kuliner yang mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sehingga terkesan tidak dimanfaatkan secara baik.
- Ventilasi udara sangat kurang, terkesan pengap, apalagi saat mati lampu ruangan menjadi gelap sehingga terlihat kurang memenuhi standar tempat jual beli yang nyaman bagi pengunjung dan penjual dalam menyediakan ikan yang bermutu, beragam, dan terjangkau.
- Kecilnya lebar selokan/saluran pembuangan air limbah sekitar 10 cm sehingga dapat berpeluang terjadinya genangan air limbah dan bau yang tidak sedap.
- Tidak memadai volume kolam retensi (kubik) yang ada di bagian belakang pasar ikan jika penjual ikan penuh. Hal ini tidak sebanding antara jumlah aliran air yang masuk ke selokan/saluran dengan bak penampung air limbah.

- Belum tersedianya *chest freezer* atau *cold storage* mini bagi para penjual ikan sebagai antisipasi jika mati listrik agar kualitas mutu produk perikanan memenuhi syarat bagi perlindungan konsumen (aman).
- Kurangnya pohon atau tanaman di lingkungan Pasar Ikan Modern untuk peneduh dan kenyamanan bagi masyarakat.

IV. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja spesifik ke TPA Sukawinatan, Kota Palembang seperti:
 - Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah Kota Palembang agar secara konsisten melakukan pemilahan dan pemisahan sampah mulai dari tempat sampah dan TPS, proses pengangkutan sampai ke TPA Sukawinatan agar proses pengolahan sampah di TPA lebih cepat.
 - Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktur Jenderal Pengolahan Sampah, Limbah, dan B3 menganggarkan bantuan alat berat berupa mobil sampah ke Pemerintah Kota Palembang di Tahun Anggaran 2021.
 - Komisi IV DPR RI meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN bersama-sama serius membuat kajian dan menindaklanjuti rencana pemanfaatan sampah di TPA Sukawinatan untuk bahan bakar pabrik semen pengganti batu bara.
 - Komisi IV DPR RI meminta kerja sama antarkementerian untuk menyelesaikan permasalahan sampah di kota-kota besar di Indonesia untuk pemanfaatan sampah sebagai pakan ternak, bahan bakar alternatif, serta kerajinan dari bahan daur ulang yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja spesifik ke Pasar Ikan Modern (PIM) Kota Palembang, seperti:
 - Komisi IV DPR RI meminta Ditjen Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Palembang dan Pengelola Pasar Ikan Modern agar membebaskan/

menggratiskan retribusi sewa dalam beberapa bulan ke depan kepada penjual ikan tanpa melanggar peraturan yang berlaku, tentunya dengan pasokan listrik yang memadai guna mendukung peningkatan perekonomian, produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk perikanan, mengembangkan sentra bisnis termasuk kuliner, serta peningkatan angka konsumsi ikan.

- Komisi IV DPR RI meminta Ditjen Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Palembang dan Pengelola Pasar Ikan Modern untuk menambah ventilasi udara dan memberikan ruangan khusus bagi penjual ikan hias, seperti cupang dan lainnya, sehingga Pasar Ikan Modern menjadi ramai pengunjung dan perputaran ekonomi masyarakat berjalan cepat, mengingat kondisinya saat ini sepi pembeli dan sepi penjual.
- Komisi IV DPR RI meminta Ditjen Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Palembang dan Pengelola Pasar Ikan Modern untuk memperbesar selokan/saluran pembuangan air limbah yang lebarnya terlalu kecil (10 cm) menjadi minimal 30-40 cm dengan elevasi/kemiringannya disesuaikan agar aliran limbah cepat mengalir menuju bak retensi dan tidak tergenang di dalam pasar karena dapat menimbulkan bau yang tidak sedap.
- Komisi IV DPR RI meminta Ditjen Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Palembang dan Pengelola Pasar Ikan Modern untuk memperbaiki sistem kolam retensi yang berada di belakang Pasar Ikan Modern, mengingat lebar dan kedalamannya terlihat tidak memadai dan tidak sebanding dengan jumlah aliran air (kubik) yang dibuang ke selokan/saluran air limbah.
- Komisi IV DPR RI meminta Ditjen Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kota Palembang dan Pengelola Pasar Ikan Modern untuk berkoordinasi/mengajukan permohonan bibit pohon yang sifatnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (hortikultura) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Komisi IV DPR RI meminta Ditjen Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kota Palembang, dan Pengelola Pasar Ikan Modern untuk mengevaluasi dan mendata siapa saja yang menjadi penjual ikan di Pasar Ikan Modern, mengingat ada laporan/ keluhan banyak pedagang ikan yang hanya terdata namanya saja, namun tidak berjalan pada lapak yang telah disediakan agar ke depan benar-benar dapat tepat sasaran kepada masyarakat kecil yang membutuhkan.
- Komisi IV DPR RI meminta Ditjen Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meminjamkan *chest freezer box* atau *cold storage* mini kepada penjual ikan dalam rangka menjaga kualitas produk ikan sehingga tahan lama dan aman konsumsi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti hasil kunker spesifik dalam Rapat Kerja ataupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Januari 2021

Ketua Tim,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151

LAMPIRAN DOKUMENTASI



LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

<https://www.metrosumsel.com/optimalisasi-pengelolaan-sampah-tim-komisi-iv-dpr-ri-kunjungi-tpa-sukawinatan/>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31555/t/Segera+Perbaiki+Tata+Kelola+Sampah+dan+Relokasi+TPA+Sukawinata+Palembang>

<https://m.rri.co.id/palembang/metropolitan/968246/tpa-sukawinatan-sudah-overload>

<https://palembang.tribunnews.com/2021/01/28/di-mata-riezky-aprilia-dari-komisi-iv-dpr-ri-terkuak-butuh-ratusan-dump-truck-untuk-tpa-sukawinatan>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31553/t/Komisi+IV+Temukan+Sejumlah+Permasalahan+di+PIM+Palembang>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31553/t/javascript;>

<https://www.dpr.go.id/berita/index/category/komisi4>

<https://kkp.go.id/djpdspkp/galeri/8464-kementerian-kelautan-dan-perikanan-bersama-komisi-iv-dpr-ri-melakukan-kunjungan-kerja-ke-pasar-ikan-modern-pim-kota-palembang>

<https://fraksi.pks.id/2021/01/28/politisi-pks-minta-kkp-optimalkan-pasar-ikan-modern-sebagai-penguatan-daya-saing/>

<https://nusadaily.com/nusantara/johan-minta-kkp-optimalkan-daya-saing-produk-perikanan.html>

<https://pewartasatu.com/komisi-iv-dpr-ri-kunker-ke-pasar-ikan-modern-palembang-johan-minta-kkp-penuhi-standar/>

<https://intens.news/banyak-pedagang-di-pim-terdaftar-tapi-tidak-punya-lapak/>